

Sejatinya negara memberikan sarana dan memfasilitasi masyarakat kaum agama untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, tentu dengan masyarakat atau seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan, Bukan malah mengeluarkan peraturan dan akhirnya menyesatkan kelompok lainnya.

Advokasi yang dilakukan oleh Komunitas Gusdurian Surabaya merupakan bentuk kepedulian antar sesama sebagai makhluk tuhan. Dan apa yang dilakukannya merupakan manifestasi dari Jaminan UU yang pro terhadap kaum minoritas. Karena kebebasan beragama dan berkeyakinan ini merupakan fitrah dan hak bagi setiap individu yang diberikan oleh tuhan, maka sepantasnya lah Gusdurian Surabaya dan masyarakat umumnya yang menyadari untuk melakukan advokasi atau pembelaan terhadap kelompok yang dilanggar kebebasannya, baik dijalur litigasi maupun non-litigasi.

Karena agama telah menjamin kebebasan dalam hal bergama dan berkeyakinan, dan secara konstitusi telah dijamin oleh UUD 1945, pancasila sebagai falsafah negara, maka pemerintah bersama sama masyarakat sipil seharusnya sadar akan jaminan yang diberikan oleh undang-undang dan agama. Oleh karenanya, Gusdurian mengembangkan emansipasi kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan dalam mengangkat martabat manusia disemua lini: kaum miskin, kaum perempuan, kaum difabel, kaum marjinal dan lain-lain yang diperlukan dalam masyarakat yang belum tumbuh menjadi masyarakat yang sehat, dan nilai-nilai demokratis belum menjadi acuan warga dan aparat bangsa.

Untuk menuntaskan beberapa masalah sosial-keagamaan yang demikian itu, menurut Gus Dur yang diperlukan diantaranya adalah *pertama*, melakukan dinamisasi bahkan yang ini perlu dilakukan semua kelompok agama dan kepercayaan berhadapan di satu sisi dengan kenyataan tradisi-modernitas, kebangsaan berdasarkan Pancasila, dan beragamanya kelompok yang ada di Indonesia. *Kedua*, melakukan pribumisasi Islam untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan kaum muslimin yang berada di setiap kondisi lokalitas, agar tidak terjebak pada Arabisasi, dan agar mampu menerapkan nilai-nilai dasar Islam pada lokalitas yang berbeda.

Selain itu, Gus Dur menyadari perlunya masyarakat muslim untuk melihat wawasan kemanusiaannya dengan berpijak pada; *pertama*, Islam menempatkan manusia pada kedudukan kemakhlukan yang sangat tinggi, yang termaktub dari kerangka penciptaannya oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan keadaan, dan ini menuntut penghargaan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan manusia yang sesuai dengan martabat kemanusiaannya, pelestarian hak-hak asasinya secara individual dan kolektif, pelestarian hak pengembangan pemikiran tanpa rasa takut, dan pengokohan hak untuk mengembangkan kepribadian tanpa pemaksaan orang lain; *kedua*, Islam memberikan hak kepada manusia untuk menjad pengganti Allah di muka bumi, sebuah prinsip yang mengharuskan kaum muslimin memperjuangkan dan melestarikan kehidupan masyarakat agar sejahtera dan adil, menentang kehidupan yang eksploitatif, tidak manusiawi dan tidak adil dalam artian yang mutlak. *Ketiga*, Islam memberikan kemampuan yang fuhtri, akal dan persepsi kejiwaan kepada manusia untuk

mementingkan masalah-masalah dasar kemanusiaan untuk menumbuhkan pemertingan keseimbangan antara hak-hak perorangan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan hidup kolektif yang berwatak universal.

b. Advokasi pembangunan rumah ibadah

Dalam pendirian rumah ibadah, SKB 3 menteri oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung yang telah memberikan pelarangan dan pemberatan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, dan beberapa gejera di surabaya. Misalnya Ahmadiyah, di situ sebenarnya juga diatur bahwa masyarakat tak boleh main hakim terhadap anggota Ahmadiyah, tapi ketentuan ini terbukti tidak efektif. Surat keputusan itu justru dijadikan alat oleh sekelompok masyarakat untuk melegalkan penyerangan. Warga Ahmadiyah dianggap melanggar surat itu karena mereka menyiarkan ajaran sesat. Pemerintah mestinya mencabut aturan yang kontroversial ini. Namun pemerintah belum melakukan apapun yang berarti untuk mencegah kasus ini terjadi.

Dengan kata lain, bahwa kerukunan umat beragama itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya keseriusan dari pemerintah dijalankannya kebijakan tersebut. Pemerintah seharusnya menjamin kebebasan bergama dan berkeyakinan yang ada di surabaya, apalagi dalam pembangunan rumah ibadah. Pada prinsipnya sebenarnya yang menjadi keberatan oleh kelompok minoritas dalam kontek pendirian rumah ibadah ini adalah pada IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), dimana dalam salah satu aturannya disitu mengharuskan kaum agama untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat minimal 90 orang. Inilah yang dirasa sangat memberatkan bagi kelompok minoritas karena sangat sulit untuk mendapatkan

persetujuan dari masyarakat yang beda agama apalagi hidup dalam minoritas. Dan juga harus mendapatkan rekom dari FKUB dan Depag pemerintah daerah.

Kerukunan dan sikap toleransi akan sulit ditegakkan manakala tidak adanya kerjasama pemerintah dengan masyarakat, karena kekerasan dalam KBB dan pendirian rumah ibadah seperti pengrusakan rumah ibadah dan penyegelan beberapa gereja, pada kenyataannya sebagian rumah ibadah secara administratif telah memenuhi aturan, akan tetapi hal ini masih bisa terjadi pengrusakan dan penyegelan. Artinya masyarakat indonesia dan surabaya khususnya harus sadar bahwa kebebasan beragama merupakan fitrah dari tuhan, dan kebebasan beragama juga telah dijamin oleh undang-undang.

Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat demi menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menumbuhkan sikap toleransi, sebagai bangsa yang majemuk dan plural, dimana setiap perbedaan tumbuh dan berkembang bisa hidup di indonesia. Dengan demikian maka perbedaan yang ada di indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Apabila misalnya ada ketegagan dan masalah terkait KBB dan pembangunan rumah ibadah misalnya harus diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Perbedaan adalah keniscayaan, maka kita menyadari akan perbedaan ini, bukankah perbedaan adalah rahmat dari tuhan yang harus kita jaga dan syukuri. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya perbedaan tadi. Tentu hal ini akan tercapai manakala kita berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dan keislaman sebagaimana yang telah diajarkan oleh Gus Dur semasa beliau hidup..

C. Saran

Dalam konteks KBB sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana masih banyak kekerasan yang terjadi di negara kita, dan surabaya sebagai sektrum pembahasan dalam enelitian ini, patut kita sadari bahwa kekerasan yang terjadi dengan mengatasmamakan agama justru hanya akan membuat agama akan termarginalkan. Semua harus membangun kesadaran akan kemajemukan dan negara yang bersifat plural agar kita sebagai bangsa yang multikultural memahami dan mensyukuri bahwa perbedaan itu adalah rahmat dan nikmat bagi kita semua.

Tidak ada sesuatu yang seemurna di dunia, hanya Tuhan lah yang maha semurna, Tuhan kita semua. Statement diatas kiranya bisa menjadi acuan dan evaluasi bagi kita semua umat beragama, khususnya dalam penulisan skripsi ini, tentu kekurangan dan ketidaksemurnaan akan ada dalam penelitian ini. Oleh karenanya peneliti disini sangat terbuka dan mengharapkan kritik dan saran jika dalam penggalian data, penyajian data, dalam penelitian ini ada kekurangan dan ketidaksempurnaan.